

DEWAN SOROTI BELANJA OPERASIONAL KURAS ANGGARAN OPD



Sumber Gambar : <https://shorturl.at/N6gEB>

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menyoroti sebagian besar anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)¹ terkuras untuk belanja operasional. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Ari Sahertian dalam Rapat Kerja bersama mitra yang dipimpin Ketua Komisi Irawadi, Senin (11/11). Ari Sahertian mengungkapkan, dari Laporan Realisasi Belanja OPD hingga Oktober 2024 ternyata anggaran tersebut masih didominasi pada belanja operasional seperti belanja pegawai. “Kalau kita lihat memang hampir semua OPD anggarannya lebih besar untuk belanja operasional termasuk belanja pegawai, sementara 30 persen lebih hanya untuk belanja program,” ujar Ari Sahertian.

Menurutnya, belanja seperti ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pimpinan OPD sebab manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program pemerintah justru sangat sedikit. Sementara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah harus memperbanyak belanja yang langsung menyentuh sektor ekonomi masyarakat. “Kedepannya ini sudah harus ada efisiensi anggaran belanja operasional pada OPD agar ada ruang bagi program kepada masyarakat,” tegas Ari Sahertian.

Belanja operasional kata Ari Sahertian memang harus ada, tetapi tidak boleh lebih besar dari belanja program kepada masyarakat. Sebab akan menimbulkan persoalan baru karena masyarakat tidak mendapatkan sentuhan pemerintah. Ari Sahertian berharap ada kebijakan yang lebih baik dari setiap Pimpinan OPD guna memastikan anggaran yang tersedia diprioritaskan pada belanja kebutuhan masyarakat.

Sumber Berita:

- 1. Harian Siwalima, “Sahertian: Belanja Operasional Kuras Anggaran OPD”, 11 November 2024; dan**

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. *Siwalimanews.com*, “*Dewan Soroti Belanja Operasional Kuras Anggaran OPD*”, 12 November 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/dewan-soroti-belanja-operasional-kuras-anggaran-opd/>, diakses 25 November 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup sedangkan Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Operasional merupakan salah satu jenis Belanja Daerah yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.